Mendagri dan Ketua KPK Instruksikan Kepala Daerah Hindari Korupsi

Rabu, 26 Januari 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Rapat Kerja (Raker) secara virtual menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menghindari korupsi. Mendagri mengingatkan bahaya korupsi, baik dampaknya terhadap individu maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketua KPK menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan perampasan hak-hak rakyat dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

KPK, kata Firli, terus mengawasi proses pemilihan dan pencalonan kepala daerah. Dalam Raker tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas membahas tentang regulasi pengadaan barang/jasa, menekankan pentingnya pemanfaatan sistem katalog elektronik (E-Katalog) untuk memperkuat produk dalam negeri.

Penguatan produk dalam negeri, kata Anas, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan bertujuan untuk meningkatkan laju investasi serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, Raker juga membahas peningkatan porsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam APBD.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.